

TRANSFORMASI POLITIK DAN STRATEGI OPERASIONAL ISIS PASCA-KEKHALIFAHAN: IMPLIKASI BAGI POLITIK KEAMANAN DI TIMUR TENGAH)

Ramadhan Arifal¹, Azarya Gerhard²

^{1,2}Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: ramadhan22002@mail.unpad.ac.id; azarya22001@mail.unpad.ac.id

Submitted: 04-06-2025; Accepted: 15-04-2025; Published :18-04-2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana transformasi politik dan strategi operasional ISIS pasca-runtuhnya kekhalifahan pada tahun 2019 memengaruhi pola sekuritisasi dalam politik keamanan di Timur Tengah. Berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana pergeseran ISIS dari entitas teritorial ke aktor pasca-teritorial membentuk konstruksi ancaman oleh negara, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis isi terhadap propaganda ISIS, laporan lembaga internasional, serta studi kasus komparatif di Irak, Suriah, Mesir (Sinai), Yaman, dan Libya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi ISIS tidak hanya bersifat organisasional, tetapi juga politis, karena mendorong pergeseran dari ancaman teritorial ke ancaman non-teritorial berbasis jaringan dan narasi, yang pada gilirannya mengubah relasi kekuasaan antara negara dan aktor non-negara serta mempersulit proses sekuritisasi, khususnya dalam memperoleh legitimasi publik (*audience acceptance*) terhadap kebijakan keamanan yang bersifat luar biasa. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga dilema legitimasi akibat perluasan kontrol keamanan yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi aktor non-negara pasca-teritorial berimplikasi pada pergeseran sekuritisasi dari berbasis militer menuju berbasis naratif dan sosial, sehingga menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami dinamika politik keamanan kontemporer.

Kata kunci: Transformasi ISIS; Jaringan Transnasional; Terorisme Digital; Kontra-Terrorisme Holistik; Lone Wolf

ABSTRACT:

This study aims to examine the political transformation and operational strategies of ISIS after the collapse of its physical caliphate in 2019, and their implications for Middle East security politics. A qualitative descriptive-analytical approach was employed, including content analysis of ISIS propaganda documents, think-tank reports, and academic literature, as well as comparative case studies in Iraq, Syria, Egypt (Sinai), Yemen, and Libya. Findings indicate that following territorial loss, ISIS evolved into a decentralized transnational network relying on regional affiliates and lone-wolf attacks, underpinned by potent digital narratives via social media. This adaptation has undermined conventional military approaches and necessitates more holistic counter-terrorism policies—encompassing social, psychological, and ideological dimensions—and enhanced international cooperation to combat extremist propaganda and address radicalization drivers.

Keywords: ISIS Transformation; Transnational Network; Digital Terrorism; Holistic Counter-Terrorism; Lone Wolf Attacks

PENDAHULUAN

Keruntuhan kekhalifahan ISIS di Suriah dan Irak pada tahun 2019 tidak serta-merta mengakhiri eksistensi kelompok tersebut dalam

dinamika politik dan keamanan global. Alih-alih mengalami disintegrasi, ISIS justru bertransformasi dari entitas teritorial yang sentralistik menjadi jaringan transnasional yang terdesentralisasi dan adaptif. Perubahan ini menandai pergeseran mendasar dalam karakter

terorisme kontemporer, di mana kontrol wilayah fisik tidak lagi menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan dan pengaruh suatu kelompok ekstremis (Lister, 2016; Clarke, 2024; German Institute for Global and Area Studies, 2021).

Dalam konteks ini, “transformasi politik” ISIS tidak hanya merujuk pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup rekonfigurasi relasinya dengan negara, masyarakat, dan sistem internasional. Pasca-kehilangan teritorial, ISIS tidak lagi beroperasi sebagai proto-state yang menantang kedaulatan negara melalui kontrol wilayah, melainkan sebagai aktor non-negara yang memanfaatkan jaringan global, afiliasi lokal, serta ruang digital untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya. Transformasi ini juga mengubah cara negara memandang dan merespons ancaman ISIS, dari ancaman militer konvensional menjadi ancaman yang bersifat asimetris, tersebar, dan berbasis narasi (Azubuike et al., 2023; Moncrieff, 2024).

Secara empiris, perubahan ini terlihat dari munculnya strategi operasional baru seperti model “franchise terror”, peningkatan serangan lone-wolf, serta intensifikasi penggunaan media digital sebagai sarana propaganda dan rekrutmen. Melalui strategi ini, ISIS mampu memperluas jangkauan pengaruhnya tanpa ketergantungan pada satu pusat komando, sekaligus memanfaatkan kondisi lokal seperti konflik berkepanjangan, lemahnya tata kelola, dan marginalisasi sosial di berbagai wilayah. Dengan demikian, ISIS tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami mutasi menjadi bentuk ancaman yang lebih sulit dideteksi dan ditanggulangi (Maher, 2019; Conway, 2020; Institute for Economics and Peace, 2025).

Perkembangan ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap politik keamanan global, khususnya dalam cara negara melakukan konstruksi ancaman (threat construction) dan merumuskan kebijakan kontra-terorisme. Ancaman yang sebelumnya bersifat teritorial kini bergeser menjadi ancaman non-teritorial yang tersebar melalui jaringan dan ruang digital. Hal ini menuntut perubahan paradigma dalam kebijakan keamanan, dari pendekatan militeristik menuju pendekatan multidimensional yang mencakup aspek sosial, ideologis, dan teknologi (International Crisis Group, 2020; U.S. Department of State, 2019).

Meskipun berbagai studi telah membahas ISIS sebagai entitas teritorial maupun jaringan

terorisme global, sebagian besar masih berfokus pada aspek militer, kapasitas organisasi, dan kontrol wilayah. Kajian-kajian tersebut cenderung belum secara memadai menjelaskan bagaimana transformasi ISIS sebagai aktor post-territorial memengaruhi dinamika politik keamanan, khususnya dalam konteks bagaimana ancaman tersebut dikonstruksi dan disecuritize oleh negara. Dengan kata lain, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang mengaitkan transformasi strategis ISIS dengan perubahan pola sekuritisasi dalam politik keamanan kontemporer (Moncrieff, 2024; Buzan et al., 1998).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berargumen bahwa transformasi ISIS pasca-kekhalfahan tidak hanya mengubah bentuk operasional kelompok tersebut, tetapi juga memengaruhi cara negara dan aktor internasional membingkai, merespons, dan melegitimasi kebijakan keamanan terhadap ancaman terorisme. Dalam kerangka ini, pendekatan Barry Buzan tentang sekuritisasi menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana ISIS dikonstruksi sebagai ancaman yang melampaui dimensi fisik dan memasuki ranah naratif serta ideologis (Buzan et al., 1998).

Dengan demikian, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana transformasi politik dan strategi operasional ISIS pasca-kekhalfahan memengaruhi pola sekuritisasi oleh negara dalam konteks politik keamanan di Timur Tengah?

Pertanyaan ini kemudian dijabarkan ke dalam dua fokus analitis, yaitu: (1) bagaimana bentuk transformasi struktural dan operasional ISIS sebagai aktor post-territorial, dan (2) bagaimana transformasi tersebut memengaruhi konstruksi ancaman serta respons kebijakan keamanan oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan studi keamanan kontemporer dengan menempatkan ISIS tidak hanya sebagai aktor kekerasan, tetapi sebagai entitas yang memengaruhi produksi wacana dan praktik keamanan global (Buzan et al., 1998; Balzacq, 2005).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam transformasi politik ISIS pasca-kekhalfahan, serta implikasinya

terhadap dinamika sekuritisasi dalam politik keamanan di Timur Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap dimensi non-material seperti narasi, ideologi, dan konstruksi ancaman yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Buzan et al., 1997; Moncrieff, 2024).

Metode utama yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) terhadap berbagai sumber data primer dan sekunder. Data primer mencakup materi propaganda ISIS yang dapat diakses secara etis dan aman, seperti publikasi dari Amaq News Agency, Dabiq Magazine, dan Al-Hayat Media Center, serta pernyataan resmi kelompok tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola narasi, transformasi ideologi, serta strategi komunikasi yang digunakan ISIS pasca-kehilangan teritorial (Conway, 2020; *Journals of The University of Chicago Press*, 2025).

Dalam proses analisis isi, penelitian ini menggunakan beberapa indikator utama, yaitu: (1) konstruksi musuh (*enemy construction*), (2) legitimasi kekerasan, (3) representasi identitas kolektif (*ummah*), (4) narasi *victimhood* dan ketidakadilan, serta (5) seruan mobilisasi dan aksi. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengkategorisasi dan menginterpretasikan konten propaganda guna memahami bagaimana ISIS membingkai dirinya dan lingkungannya dalam konteks pasca-teritorial (Bail et al., 2018; Conway, 2020).

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur akademis dan laporan lembaga internasional. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, serta laporan dari lembaga seperti Center for Strategic and International Studies, Brookings Institution, International Crisis Group, Royal United Services Institute, Foreign Policy Research Institute, Institute for Economics and Peace, German Institute for Global and Area Studies, International Centre for Counter-Terrorism, serta Peace Research Institute Frankfurt. Laporan pemerintah seperti U.S. Department of State Country Reports on Terrorism juga digunakan untuk memperkaya analisis empiris (Center for Strategic and International Studies, n.d.; International Crisis Group, 2025; U.S. Department of State, 2019).

Penelitian ini menerapkan desain studi kasus komparatif terbatas (*limited comparative case study*) dengan fokus pada Irak, Suriah, Mesir

(Sinai), Yaman, dan Libya. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: (1) tingkat paparan terhadap aktivitas ISIS pasca-2019, (2) kondisi kelemahan negara atau konflik internal yang memungkinkan penetrasi aktor non-negara, serta (3) variasi respons kebijakan keamanan negara terhadap ancaman ISIS. Irak dan Suriah dipilih sebagai bekas pusat kekhalifahan yang masih menjadi basis operasional residual ISIS. Sinai (Mesir), Yaman, dan Libya dipilih sebagai kasus perluasan jaringan ISIS di wilayah dengan konflik berkepanjangan dan kapasitas negara yang terbatas, sehingga memungkinkan analisis komparatif terhadap pola adaptasi dan sekuritisasi yang berbeda (Almohamad, n.d.; Dermawan et al., 2024; PRIF, 2025).

Secara teoritik, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pertama, teori sekuritisasi dari Copenhagen School yang dikembangkan oleh Barry Buzan digunakan untuk menganalisis bagaimana ISIS dikonstruksi sebagai ancaman melalui *speech acts*, aktor sekuritisasi, audiens, serta implikasi kebijakan yang dihasilkan (Buzan et al., 1997). Kedua, pendekatan aktor non-negara dalam politik internasional digunakan untuk memahami posisi ISIS sebagai entitas yang beroperasi di luar struktur negara namun memiliki kapasitas memengaruhi dinamika keamanan global (Azubuike et al., 2023). Ketiga, konsep kekerasan politik dan ideologi digunakan untuk menjelaskan bagaimana narasi ideologis ISIS berfungsi sebagai basis legitimasi tindakan kekerasan (Mohamedou, 2018).

Ketiga pendekatan tersebut diintegrasikan dalam satu analytical framework yang menempatkan transformasi ISIS sebagai variabel utama yang memengaruhi dua dimensi analisis, yaitu: (1) produksi narasi ideologis melalui propaganda (*level aktor*), dan (2) respons sekuritisasi oleh negara dalam bentuk kebijakan dan praktik keamanan (*level sistem*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis ISIS sebagai aktor, tetapi juga interaksi antara produksi ancaman dan konstruksi respons dalam politik keamanan kontemporer (Buzan et al., 1997; Moncrieff, 2024).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pengumpulan dan seleksi data, (2) proses coding berdasarkan indikator yang telah ditentukan, (3) kategorisasi

tema dan pola narasi, serta (4) interpretasi dalam kerangka teori yang digunakan. Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari propaganda ISIS, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mengurangi bias dalam interpretasi data (International Crisis Group, 2025; International Centre for Counter-Terrorism, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Transformasi Struktural dan Ideologis ISIS Pasca-Kekhalifahan

Keruntuhan kekhalifahan fisik ISIS pada tahun 2019 tidak menandai akhir dari kelompok tersebut, melainkan memicu fase transformasi yang mendalam, baik secara struktural maupun ideologis. Kehilangan kontrol teritorial di Irak dan Suriah memaksa ISIS untuk beradaptasi dan mengubah model operasinya secara fundamental.

A. Dari Entitas Teritorial ke Jaringan Transnasional yang Adaptif

Hilangnya kontrol teritorial di Irak dan Suriah pada tahun 2019, yang berpuncak pada jatuhnya Baghouz, merupakan pukulan telak bagi ISIS sebagai entitas proto-negara yang pernah menguasai wilayah seukuran Inggris Raya dan memerintah jutaan orang (Almohamad, 2021). Namun, kekalahan militer ini tidak menyingkirkan ISIS, melainkan memaksanya untuk kembali ke akar pemberontakannya dan bertransformasi menjadi bentuk yang lebih sulit dihadapi. ISIS tidak lagi berfungsi sebagai entitas teritorial yang mengelola wilayah dan populasi secara langsung, melainkan bergeser menjadi jaringan global yang lebih cair, terdesentralisasi, dan terdiri dari berbagai afiliasi regional serta sel-sel klandestin yang tersebar (Almohamad, 2021). Model jaringan ini secara signifikan mengurangi ketergantungan ISIS pada satu pusat komando fisik dan meningkatkan ketahanannya terhadap tekanan kontra-terorisme yang berkelanjutan (Almohamad, 2021). Laporan GIGA Focus pada tahun 2021 mengonfirmasi bahwa pasca-2019, ISIS mengintensifkan perang gerilya dan berhasil mempertahankan pengaruh di area-area tertentu meskipun telah kehilangan basis teritorialnya (Almohamad, 2021). Demikian pula, analisis dari

Foreign Policy Research Institute (FPRI) pada tahun 2024 menekankan adaptasi ISIS menjadi jaringan terdesentralisasi dengan cabang-cabang regional yang memiliki otonomi operasional (Clarke, 2024). Studi mengenai The Long Jihad juga mendukung gagasan ini dengan membahas model pemberontakan ISIS yang mencakup fase-fase operasi non-konvensional ketika kelompok berada dalam posisi yang lebih lemah (Program on Extremism, n.d.).

Secara operasional, peran kepemimpinan pusat ISIS, meskipun tetap penting secara simbolis dan sebagai penjaga kemurnian ideologi, tampak berkurang dalam mengarahkan operasi sehari-hari. Setelah kematian Abu Bakr al-Baghdadi dan penggantinya Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, pengambilan keputusan taktis semakin didelegasikan kepada komandan-komandan lapangan dan pimpinan afiliasi regional (Almohamad, 2021). General Directorate of Provinces (GDP) ISIS memainkan peran penting dalam mengoordinasikan dan memberikan panduan operasional serta pendanaan kepada afiliasi global, dibantu oleh kantor-kantor regional (Maktab) yang dibentuk sekitar tahun 2019 untuk menjembatani antara teater lokal, jaringan global, dan kepemimpinan pusat ISIS (Clarke, 2024). Transformasi struktural ini memiliki implikasi signifikan: ISIS menjadi target yang lebih sulit dideteksi dan dilawan menggunakan strategi kontra-terorisme konvensional yang selama ini berfokus pada penghancuran pusat komando fisik atau perebutan kembali wilayah.

Pergeseran ini menghadirkan sebuah paradoks desentralisasi. Di satu sisi, struktur yang lebih tersebar meningkatkan ketahanan ISIS terhadap serangan yang menargetkan kepemimpinan pusat, memungkinkan sel-sel dan afiliasi untuk terus beroperasi bahkan jika satu bagian dari jaringan terganggu. Kemampuan untuk beroperasi secara independen memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap kondisi lokal. Namun, di sisi lain, desentralisasi yang ekstensif dalam jangka panjang dapat menimbulkan risiko fragmentasi ideologis atau operasional. Jika afiliasi menjadi terlalu otonom atau mulai mengembangkan agenda lokal yang menyimpang dari garis utama ISIS, kohesi jaringan secara keseluruhan dapat terancam. Meskipun data hingga tahun 2021 mengindikasikan bahwa kohesi ideologis ISIS masih terjaga (Almohamad, 2021), potensi divergensi ini tetap menjadi tantangan

laten. Kekuatan ideologi Salafi-Jihadi yang kaku dan penggunaan propaganda yang terkoordinasi secara tematik dari pusat (meskipun kini lebih bersifat virtual) kemungkinan bertindak sebagai mekanisme penyeimbang terhadap fragmentasi untuk saat ini.

Lebih jauh, transformasi ini melahirkan konsep “kekhalfahan digital” atau “kekhalfahan dalam pikiran”. Dengan hilangnya manifestasi fisik kekhalfahan, ISIS semakin mengandalkan ruang virtual untuk mempertahankan identitas, menyebarkan pengaruh, dan merekrut pengikut (Almohamad, 2021). Entitas abstrak ini, yang tidak terikat oleh batas geografis dan dapat menjangkau individu secara global melalui internet, terbukti jauh lebih sulit untuk “dikalahkan” dibandingkan dengan entitas teritorial. Upaya kontra-terorisme tradisional yang bersifat militeristik atau penegakan hukum kurang efektif dalam memberantas ideologi yang menyebar secara daring. Fenomena ini menuntut pengembangan strategi kontra-narasi yang lebih canggih, upaya deradikalisasi yang komprehensif, dan kerja sama internasional dalam mengelola ruang siber.

Transformasi ISIS dari entitas teritorial menjadi jaringan transnasional tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga secara fundamental mengubah relasi kekuasaan antara negara dan aktor non-negara dalam politik keamanan. Dalam kerangka sekuritisasi, perubahan ini menggeser objek ancaman (referent object) dari kedaulatan teritorial negara menjadi keamanan masyarakat sipil dan stabilitas sosial yang lebih abstrak (Buzan et al., 1997; Moncrieff, 2024).

Negara-negara di Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah, bertindak sebagai securitizing actors yang mengonstruksi ISIS sebagai ancaman eksistensial melalui berbagai speech acts, termasuk deklarasi darurat keamanan, operasi militer, serta narasi resmi mengenai “perang melawan terorisme” (Buzan et al., 1997; Center for Strategic and International Studies, n.d.). Namun, berbeda dengan fase kekhalfahan teritorial, ancaman ISIS pasca-2019 tidak lagi bersifat terpusat, sehingga mempersulit proses sekuritisasi yang biasanya bergantung pada identifikasi musuh yang jelas dan terlokalisasi (Almohamad, n.d.; Dermawan et al., 2024).

Akibatnya, negara menghadapi tantangan dalam memperoleh audience acceptance, terutama ketika ancaman bersifat laten, tersebar, dan tidak

selalu terlihat secara langsung. Dalam beberapa kasus, seperti di Irak, kebijakan keamanan yang represif terhadap komunitas tertentu justru melemahkan legitimasi negara dan memperkuat narasi victimhood yang dieksploitasi oleh ISIS (Bail et al., 2018; International Crisis Group, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ISIS tidak hanya meningkatkan kompleksitas ancaman, tetapi juga menciptakan dilema legitimasi bagi negara dalam menjalankan extraordinary measures (Buzan et al., 1997).

Dengan demikian, transformasi struktural ISIS berimplikasi langsung pada pergeseran pola sekuritisasi: dari model konvensional berbasis ancaman teritorial menuju model yang lebih berbasis narasi, persepsi, dan kontrol sosial. Pergeseran ini menandai perubahan penting dalam politik keamanan kontemporer, di mana kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh kontrol wilayah, tetapi juga oleh kemampuan membentuk konstruksi ancaman di tingkat masyarakat (Buzan et al., 1997; Conway, 2020; Moncrieff, 2024).

B. Desentralisasi Komando dan Strategi “Franchise Terror”

Salah satu manifestasi paling jelas dari transformasi struktural ISIS adalah adopsi strategi “franchise terror”. Konsep ini merujuk pada model di mana kelompok-kelompok militan lokal di berbagai belahan dunia diberikan semacam “lisensi” ideologis dan simbolis untuk beroperasi atas nama ISIS, seringkali tanpa harus menerima komando operasional langsung dari kepemimpinan pusat (Almohamad, 2021). Dengan kata lain, ISIS mendelegasikan otoritas terornya, memungkinkan kelompok-kelompok terafiliasi untuk melakukan serangan dan aktivitas lain yang sejalan dengan agenda global ISIS, sambil memanfaatkan pengetahuan dan jaringan lokal mereka. Strategi ini, seperti yang dianalisis oleh Maher (2019) sebagai bentuk “perang proksi” (war by proxy), memungkinkan ISIS untuk memperluas jangkauan globalnya secara signifikan dengan investasi sumber daya yang relatif minimal dari pusat (Almohamad, 2021).

Peran afiliasi regional menjadi semakin krusial bagi keberlangsungan dan relevansi ISIS pasca-runtuhnya kekhalfahan. Dari Afrika Sub-Sahara hingga Asia Tenggara, dan tentu saja di jantung Timur Tengah sendiri, berbagai kelompok telah menyatakan baiat (sumpah setia) kepada ISIS dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan

operasinya (Clarke, 2025). Afiliasi-afiliasi ini seringkali memiliki otonomi operasional yang cukup besar dalam merencanakan dan melaksanakan serangan, merekrut anggota, dan menggalang dana di wilayah masing-masing. Namun, mereka umumnya tetap loyal pada ideologi inti Salafi-Jihadi yang diusung ISIS dan secara teratur melaporkan aktivitas mereka atau mendapatkan pengakuan melalui media propaganda pusat ISIS. Laporan dari *Understanding War* (Januari 2025) memberikan analisis terbaru mengenai peran penting afiliasi seperti IS Khorasan Province (ISKP), IS Turki, dan berbagai cabang ISIS di Afrika (ISCAP, ISMP, ISSP, ISS, ISWAP) dalam jaringan global, termasuk keterlibatan mereka dalam pendanaan dan perencanaan serangan eksternal (Clarke, 2025). Laporan Tahunan Terorisme Negara AS tahun 2019 juga mengonfirmasi aktivitas signifikan dari afiliasi ISIS di Afrika dan Asia (U.S. Department of State, 2019).

Model “franchise terror” ini menawarkan sejumlah keuntungan bagi ISIS. Fleksibilitas taktis memungkinkan afiliasi untuk menyesuaikan operasi mereka dengan kondisi dan target lokal, menjadikannya lebih efektif. Adaptasi terhadap konteks lokal juga membantu dalam upaya rekrutmen dan mobilisasi dukungan. Selain itu, jangkauan global ISIS menjadi jauh lebih luas daripada yang bisa dicapai jika hanya mengandalkan operasi terpusat. Namun, model ini juga bukannya tanpa potensi kerugian. Risiko fragmentasi ideologis atau hilangnya “kontrol kualitas” atas tindakan afiliasi selalu ada, terutama jika komunikasi dengan kepemimpinan pusat melemah atau jika agenda lokal afiliasi mulai mendominasi. Meskipun demikian, hingga saat ini, ISIS tampaknya berhasil menjaga tingkat kesatuan ideologis yang cukup tinggi di antara jaringannya, sebagian besar melalui propaganda terpusat dan penekanan pada loyalitas kepada Khalifah (Almohamad, 2021).

Strategi “franchise terror” tidak hanya merepresentasikan adaptasi operasional, tetapi juga memiliki implikasi mendalam terhadap relasi kekuasaan dalam sistem internasional. Dengan mendelegasikan otoritas kekerasan kepada aktor-aktor lokal, ISIS secara efektif mengaburkan batas antara konflik domestik dan ancaman transnasional. Dalam konteks ini, negara tidak lagi menghadapi musuh yang terpusat dan teridentifikasi secara jelas, melainkan jaringan

aktor non-negara yang beroperasi lintas batas dengan tingkat otonomi tinggi (Almohamad, n.d.; Dermawan et al., 2024; International Centre for Counter-Terrorism, n.d.).

Dalam kerangka sekuritisasi, kondisi ini memperumit posisi negara sebagai securitizing actor, karena ancaman tidak lagi bersifat tunggal dan terlokalisasi. Akibatnya, proses konstruksi ancaman menjadi lebih kompleks dan seringkali menghasilkan kebijakan keamanan yang lebih luas dan generalistik, yang berpotensi memperluas praktik extraordinary measures ke berbagai sektor kehidupan masyarakat (Buzan et al., 1997; Moncrieff, 2024; International Crisis Group, 2025).

Implikasi jangka panjang dari strategi “franchise terror” ini sangat signifikan bagi keamanan global. Hal ini dapat menyebabkan proliferasi kekerasan ekstremis yang lebih luas dan lebih sulit diprediksi. Kelompok-kelompok militan lokal, yang mungkin sebelumnya memiliki agenda terbatas, dapat mengadopsi label ISIS untuk mendapatkan legitimasi, sumber daya, atau perhatian internasional. Fenomena ini mengaburkan batas antara konflik lokal yang berakar pada isu-isu spesifik suatu daerah dengan terorisme transnasional yang memiliki agenda global. Akibatnya, upaya kontra-terorisme menjadi lebih kompleks, karena harus mampu membedakan antara ancaman yang benar-benar terkoordinasi oleh ISIS pusat dengan ancaman yang bersifat lokal namun menggunakan bendera ISIS. Lebih jauh, keberhasilan satu afiliasi “waralaba” dapat menginspirasi pembentukan afiliasi baru di wilayah lain, menciptakan efek domino yang memperluas jejak kekerasan ISIS.

C. Upaya Mempertahankan Kohesi Ideologis Pasca-Teritorial

Kehilangan kekhalifahan fisik merupakan tantangan ideologis besar bagi ISIS, mengingat klaim sentralnya adalah pendirian dan perluasan sebuah negara Islam. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan kohesi ideologis di antara para pendukungnya yang tersebar menjadi prioritas utama pasca-2019.

Salah satu strategi utama adalah mengadaptasi narasi untuk menjelaskan hilangnya wilayah tanpa merusak klaim ideologis fundamental. Penekanan bergeser dari mempertahankan negara fisik menjadi narasi keberlanjutan jihad sebagai sebuah perjuangan

jangka panjang dan abadi, sebuah “jihad panjang” (Program on Extremism, n.d.) yang tidak terikat pada keberhasilan atau kegagalan sementara dalam menguasai teritori. Laporan GIGA Focus (2021) mencatat bahwa meskipun kehilangan wilayah dan kematian al-Baghdadi, kohesi organisasional dan ideologis ISIS tidak memburuk secara signifikan, dan propaganda kelompok ini terus merujuk pada “kekhalfahan” dan kewajiban jihad (Almohamad, 2021). Narasi ini menyiratkan bahwa kekhalfahan bukanlah tujuan akhir semata, melainkan sebuah fase dalam perjuangan yang lebih besar, dan bahwa kekalahan teritorial hanyalah ujian yang harus dihadapi oleh para mujahidin sejati.

Ideologi Salafi-Jihadi yang kaku dan eksklusif tetap menjadi perekat utama yang mempersatukan berbagai faksi, afiliasi, dan individu pendukung ISIS di seluruh dunia (Bail, Merhout, & Ding, 2018). Ideologi ini menawarkan kerangka pandang dunia yang komprehensif, identitas kolektif yang kuat, dan justifikasi teologis untuk kekerasan terhadap mereka yang dianggap “kafir” atau “murtad”. Dengan terus-menerus mereproduksi dan menyebarkan doktrin inti ini, ISIS berusaha memastikan bahwa semua elemen dalam jaringannya tetap berada pada jalur ideologis yang sama.

Dalam konteks pasca-teritorial, peran propaganda digital menjadi semakin sentral dalam upaya mempertahankan komunitas virtual para ekstremis. Media online, termasuk media sosial, forum diskusi, aplikasi pesan terenkripsi, dan situs web propaganda, menjadi ruang vital untuk memelihara rasa kebersamaan (*esprit de corps*), menyebarkan fatwa dan arahan ideologis, memperkuat loyalitas kepada kepemimpinan ISIS, dan menginspirasi tindakan kekerasan (Almohamad, 2021). Melalui platform-platform ini, ISIS dapat terus berkomunikasi dengan para pendukungnya, memberikan mereka “panduan” spiritual dan praktis, serta menciptakan ilusi bahwa “kekhalfahan” tetap hidup dalam bentuk komunitas online global. Tema-tema persahabatan, tujuan bersama, dan kehidupan ideal di bawah naungan ISIS, meskipun kini lebih bersifat virtual, terus digaungkan untuk menjaga moral dan komitmen para pengikut. Keruntuhan kekhalfahan fisik ISIS pada tahun 2019 tidak menandai akhir dari kelompok tersebut, melainkan memicu fase transformasi yang mendalam, baik secara struktural maupun ideologis. Kehilangan kontrol teritorial di Irak dan Suriah memaksa ISIS untuk

beradaptasi dan mengubah model operasinya secara fundamental.

II. Adaptasi Strategi Operasional dalam Politik Keamanan Timur Tengah

Transformasi struktural dan ideologis ISIS pasca-kekhalfahan secara langsung memengaruhi adaptasi strategi operasionalnya, khususnya dalam konteks politik keamanan Timur Tengah yang dinamis dan penuh gejolak. Kehilangan kemampuan untuk mempertahankan wilayah secara konvensional mendorong ISIS untuk beralih ke taktik yang lebih asimetris dan terdesentralisasi.

A. Perang Gerilya dan Serangan Lone Wolf sebagai Taktik Dominan

Setelah tidak lagi mampu terlibat dalam pertempuran skala besar untuk mempertahankan atau merebut kembali wilayah, ISIS secara signifikan kembali ke akar pemberontakannya, dengan mengandalkan taktik perang gerilya yang fleksibel dan sulit diprediksi. Laporan GIGA Focus (2021) menyatakan bahwa pasca-2019, ISIS mengintensifkan perang gerilya dengan membentuk unit-unit tempur kecil yang gesit, termasuk serangan mendadak terhadap patroli keamanan, penyerangan konvoi militer, penggunaan alat peledak improvisasi (IED) di jalan atau kendaraan, serta pembunuhan yang ditargetkan terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat yang dianggap mendukung “musuh”, dan anggota pasukan keamanan (GIGA Hamburg, 2021). Analisis dari Program on Extremism dalam *The Long Jihad* juga menggarisbawahi bahwa strategi kelompok ini mencakup fase-fase perang non-konvensional ketika menghadapi tekanan militer yang superior (Program on Extremism, n.d.).

Seiring dengan perang gerilya, fenomena serangan lone wolf (pelaku tunggal) dan sel-sel kecil yang otonom menjadi semakin menonjol dalam modus operandi ISIS pasca-kekhalfahan (GIGA Hamburg, 2021). Serangan-serangan ini seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang terinspirasi oleh ideologi ISIS melalui propaganda online, tetapi tidak selalu menerima perintah atau dukungan material langsung dari struktur komando pusat (Institute for Economics & Peace, 2025). Laporan IEP Maret 2025 menyoroti bahwa serangan lone wolf kini lebih umum daripada serangan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir di negara-negara Barat, dan banyak di

antaranya terinspirasi oleh ISIS (Institute for Economics & Peace, 2025). Contoh serangan terinspirasi ISIS, seperti insiden di New Orleans pada Januari 2025 yang menewaskan 14 orang, menunjukkan jangkauan global ideologi ini (Human Rights Watch, 2025). Selain itu, laporan *Understanding War* (Januari 2025) memprediksi bahwa kekuatan ISIS yang kembali tumbuh di Suriah akan semakin menginspirasi lebih banyak serangan lone wolf secara global (Institute for the Study of War, 2025). Serangan-serangan ini memberikan tantangan besar bagi badan intelijen dan penegak hukum karena sulitnya mendeteksi individu yang meradikal secara mandiri dan merencanakan serangan kecil atau seorang diri.

Fenomena lone wolf memperumit proses sekuritisasi karena mengaburkan batas antara ancaman internal dan eksternal. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan warga negara itu sendiri, sehingga negara tidak lagi menghadapi ancaman eksternal yang jelas, melainkan ancaman yang muncul dari dalam masyarakat. Dalam kerangka sekuritisasi, pemerintah bertindak sebagai securitizing actor yang berupaya mengonstruksi ancaman melalui berbagai speech acts, seperti pernyataan resmi mengenai bahaya radikalisme domestik, peningkatan status siaga keamanan, serta kebijakan kontra-terorisme yang diperluas (Buzan et al., 1997; Institute for Economics & Peace, 2025; Gill et al., 2017).

Namun demikian, karakter ancaman yang terdesentralisasi dan berbasis individu ini menyulitkan negara dalam memperoleh audience acceptance. Ketika ancaman tidak selalu terlihat secara langsung atau tidak terorganisir secara jelas, legitimasi kebijakan keamanan—terutama yang melibatkan peningkatan pengawasan—seringkali dipertanyakan oleh publik. Dalam beberapa konteks, kebijakan yang dianggap terlalu intrusif justru memicu resistensi sosial dan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak-hak sipil (Bail et al., 2018; International Crisis Group, 2025).

Dalam perspektif ini, transformasi ISIS telah menggeser arena politik keamanan dari medan militer ke ruang domestik, di mana negara tidak hanya dituntut untuk menjamin keamanan, tetapi juga mempertahankan legitimasi politik di hadapan masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, ancaman ISIS tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga politis, karena memengaruhi hubungan antara negara dan warga negara serta membentuk ulang batas-batas antara keamanan dan kebebasan dalam

praktik kebijakan publik (Moncrieff, 2024; Conway, 2020).

Target serangan ISIS pasca-kekhalifahan juga menunjukkan adaptasi. Selain menargetkan pasukan keamanan dan infrastruktur negara untuk melemahkan otoritas pemerintah dan menunjukkan kemampuan operasional, ISIS kini semakin sering menyerang “target lunak” seperti tempat ibadah, pasar, atau acara publik. Tujuan serangan pada target lunak ini adalah untuk memaksimalkan dampak psikologis, menyebarkan ketakutan, dan memperoleh publisitas luas. Misalnya, ledakan di gedung konser di Moskow pada Maret 2024 dan bom bunuh diri di Kerman, Iran pada Januari 2024 merupakan contoh nyata taktik semacam ini (Foreign Policy Research Institute, 2024). Di Irak, meski kekhalifahan telah runtuh, ISIS tercatat melakukan serangan bom bunuh diri di pusat kota Baghdad pada Januari 2021, yang menunjukkan kemampuan mereka menyerang bahkan di ibu kota yang dijaga ketat (GIGA Hamburg, 2021).

Peningkatan serangan lone wolf yang terinspirasi secara digital menimbulkan dilema bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan keamanan. Di satu sisi, upaya mencegah serangan dan melindungi warga memerlukan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, termasuk peningkatan pengawasan dan pembatasan tertentu. Namun, kebijakan keamanan yang terlalu represif atau intrusif berisiko melanggar kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Tindakan semacam itu berpotensi mengasingkan komunitas tertentu—terutama jika mereka merasa menjadi sasaran tidak adil—yang kemudian dapat menciptakan lahan subur bagi narasi anti-pemerintah yang dieksploitasi kelompok ekstremis (Bail, Merhout, & Ding, 2018). Oleh karena itu, negara-negara harus menemukan keseimbangan antara menjamin keamanan publik dan melindungi hak-hak fundamental. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih bernuansa, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, program deradikalisasi dini, dan strategi kontra-narasi komprehensif untuk meredam propaganda ekstremis secara online.

B. Eksploitasi Konflik Lokal dan Kekosongan Tata Kelola: Studi Kasus Regional

Salah satu ciri utama strategi ISIS—baik sebelum maupun sesudah keruntuhan kekhalifahan fisiknya—adalah kemampuannya mengeksploitasi

ketidakstabilan politik, konflik sektarian, keluhan sosial-ekonomi mendalam, serta kelemahan institusi negara di berbagai wilayah untuk merekrut anggota, melancarkan operasi, dan memperluas pengaruh (GIGA Hamburg, 2021). Laporan GIGA Focus (2021) menegaskan bahwa ISIS terus memanfaatkan fragmentasi politik, keamanan, sosial, dan ekonomi di Irak dan Suriah (GIGA Hamburg, 2021). Demikian pula, analisis dari International Crisis Group (2025) dan U.S. State Department (2019) menyoroti bagaimana kelompok ekstremis, termasuk ISIS, secara rutin memanfaatkan vakum politik dan lemahnya infrastruktur tata kelola untuk membangun zona aman bagi operasi mereka (International Crisis Group, 2025; U.S. Department of State, 2019). Laporan FPRI (2024) juga menggarisbawahi strategi ISIS mendirikan kelompok-kelompok waralaba di wilayah yang dicirikan oleh korupsi politik, kesenjangan sosial-ekonomi parah, dan tata kelola lemah (Foreign Policy Research Institute, 2024).

Berikut adalah analisis studi kasus di beberapa negara kunci di Timur Tengah:

1. Irak: Meskipun kekhalifahan telah runtuh, Irak tetap menjadi medan pertempuran penting bagi ISIS. Kelompok ini terus melakukan serangan sporadis dan berupaya membangun kembali jaringan sel tidurnya, terutama di daerah-daerah mayoritas Sunni yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat Baghdad atau di mana kehadiran aparat keamanan lemah (GIGA Hamburg, 2021). Laporan GIGA Focus (2021) merinci peningkatan serangan ISIS di Irak pada 2020 dan bagaimana kelompok tersebut mengeksploitasi perselisihan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di wilayah sengketa (GIGA Hamburg, 2021). Laporan CSIS (2020) membahas penilaian resmi AS mengenai aktivitas ISIS yang berkelanjutan di Irak, menyoroti perdebatan di kalangan analis tentang apakah ISIS benar-benar bangkit kembali atau hanya memanfaatkan peluang akibat dinamika politik dan keamanan lokal (Cordesman, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah Irak menghadapi ujaran kebencian dan sisa-sisa ideologi ISIS pasca-kekalahan teritorial menjadi sangat penting untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok tersebut dalam jangka panjang (ResearchGate, 2025).
2. Suriah: Negara ini tetap menjadi episentrum aktivitas ISIS di Timur Tengah. Kelompok ini terus mengeksploitasi perang saudara yang kompleks dan berlarut-larut, melibatkan berbagai aktor lokal, regional, dan internasional. Jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 menciptakan kekosongan kekuasaan baru yang dimanfaatkan ISIS untuk konsolidasi dan memperluas operasinya (GIGA Hamburg, 2021). Laporan Understanding War (Januari 2025) memberikan analisis terbaru tentang kebangkitan ISIS di Suriah pasca-Assad, termasuk laporan tentang penyitaan stok senjata dari bekas pangkalan militer rezim (Institute for the Study of War, 2025). Analisis PRIF (April 2025) juga menekankan ancaman ISIS yang meningkat di Suriah pasca-Assad, dengan perkiraan sekitar 2.500 pejuang ISIS masih aktif di Suriah dan Irak, serta menyoroti bahaya laten dari penjara dan kamp yang menampung ribuan anggota ISIS dan keluarga mereka (PRIF, 2025). Kamp-kamp tahanan seperti Al-Hol dan Roj, yang menampung puluhan ribu perempuan dan anak-anak terkait ISIS, dianggap “bom waktu” dan pusat potensial perekrutan serta radikalisasi generasi baru ekstremis (PRIF, 2025).
3. Mesir (Sinai): Afiliasi ISIS di Semenanjung Sinai, dikenal sebagai IS-Sinai atau Wilayah Sinai, telah lama menjadi salah satu cabang ISIS paling aktif dan mematikan. Kelompok ini secara efektif mengeksploitasi keluhan historis suku Badui setempat terhadap pemerintah pusat Mesir, marginalisasi ekonomi di wilayah tersebut, serta taktik kontra-pemberontakan pemerintah Mesir yang keras dan tidak proporsional, yang justru memicu kebencian dan mendorong rekrutmen (Arab Center DC, 2022). Meskipun laporan U.S. State Department (2023) menunjukkan penurunan signifikan jumlah serangan IS-Sinai (kurang dari 10

serangan pada 2023) dan beberapa sumber menyatakan Wilayah Sinai tampak “dormant” pada 2023, potensi ancaman tidak bisa diabaikan sepenuhnya mengingat sejarah panjang aktivitas kelompok ini dan kondisi mendasar yang belum terselesaikan di Sinai (U.S. Department of State, 2023).

4. Yaman: Di tengah perang saudara yang menghancurkan dan fragmentasi politik parah, ISIS-Yaman (ISIS-Y) muncul sebagai salah satu aktor ekstremis yang mencoba mendapatkan pijakan. Meskipun secara umum dianggap lebih kecil dan kurang berpengaruh dibandingkan Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), ISIS-Y tetap aktif secara operasional, melakukan serangan, dan bersaing dengan AQAP untuk mendapatkan sumber daya dan rekrutan (U.S. Department of State, 2020). Laporan U.S. State Department (2020) mengonfirmasi bahwa meski lebih kecil dari AQAP, ISIS-Y terus mengklaim serangan dan memanfaatkan kekosongan keamanan di negara tersebut (U.S. Department of State, 2020).
6. Libya: Libya, terjerat dalam konflik internal dan perpecahan politik

berkepanjangan sejak jatuhnya rezim Gaddafi, menjadi lahan subur bagi ISIS mengeksploitasi “Area dengan Keterbatasan Negara” (Areas of Limited Statehood – ALS). ISIS berupaya mengontrol wilayah tertentu, merusak stabilitas, dan menawarkan bentuk-bentuk tata kelola alternatif di daerah tanpa otoritas negara yang efektif. Namun, ISIS di Libya menghadapi tantangan besar dalam membangun legitimasi di mata penduduk lokal dan bersaing dengan berbagai milisi serta faksi bersenjata (Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan Province, n.d.). Analisis ICT (n.d.) merinci bagaimana ISIS mengeksploitasi kesenjangan dalam aspek keamanan, legitimasi, kapasitas pemerintahan, dan kesejahteraan manusia di Libya untuk memperkuat posisinya (International Institute for Counter-Terrorism, n.d.)

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai adaptasi operasional ISIS di berbagai teater kunci di Timur Tengah pasca-2019, tabel berikut menyajikan ringkasan informasi:

Tabel 1: Aktivitas Afiliasi ISIS di Teater Kunci Timur Tengah Pasca-2019

Negara/Wilayah	Nama Afiliasi (jika spesifik)	Taktik Utama	Kerentanan yang Dieksploitasi	Perkiraan Kekuatan/Status (Tahun)
Irak	IS-Iraq / ISIS	Perang gerilya, serangan IED, pembunuhan, eksploitasi vakum politik, propaganda digital, serangan terhadap pasukan keamanan & sipil.	Konflik internal (Baghdad-KRG), tata kelola lemah di beberapa area, keluhan sektarian/sosial-ekonomi, perbatasan poros.	Masih aktif melakukan serangan sporadis (2020-2021); ~2.500 gabungan di Irak & Suriah (2025).

Suriah	IS-Syria / ISIS	Perang gerilya, serangan terhadap pasukan keamanan & sipil, eksploitasi perang saudara, propaganda & rekrutmen di kamp tahanan, penyitaan senjata pasca-Assad.	Perang saudara berkepanjangan, kekosongan kekuasaan pasca-Assad, fragmentasi oposisi, kamp tahanan yang rentan (Al-Hol, Roj).	Bangkit kembali pasca-Assad (2025); ~2.500 gabungan di Irak & Suriah (2025); ribuan di tahanan.
Mesir (Sinai)	IS-Sinai / Wilayah Sinai	Serangan terhadap pos pemeriksaan & pasukan keamanan, IED, eksploitasi keluhan lokal (Badui), intimidasi.	Marginalisasi ekonomi & politik suku Badui, taktik kontra-pemberontakan pemerintah yang keras, perbatasan poros.	Aktivitas menurun signifikan pada 2023 (<10 serangan); dilaporkan "dormant" oleh beberapa sumber (2023).
Yaman	ISIS-Yaman (ISIS-Y)	Serangan sporadis, bersaing dengan AQAP, eksploitasi perang saudara.	Perang saudara, tata kelola sangat lemah, kekosongan keamanan.	
Libya	ISIS-Libya	Eksplorasi Area Keterbatasan Negara (ALS), upaya membangun kontrol teritorial & tata kelola alternatif, serangan terhadap institusi.	Konflik internal berkepanjangan, fragmentasi politik, institusi negara lemah, kesenjangan layanan publik.	Aktif mengeksploitasi vakum, namun kesulitan membangun legitimasi lokal.

III. Adaptasi Strategi Operasional dalam Politik Keamanan Timur Tengah

Kehadiran ISIS di wilayah-wilayah konflik seperti Suriah, Irak, atau Yaman tidak hanya sekadar mengeksploitasi konflik yang sudah ada, tetapi juga berpotensi bertindak sebagai akselerator konflik tersebut. Dengan agenda sektarian yang jelas dan taktik yang brutal, ISIS dapat memperburuk perpecahan antar kelompok masyarakat, merusak upaya-upaya perdamaian yang rapuh, dan bahkan menarik intervensi dari aktor-aktor eksternal yang memiliki kepentingan sendiri (GIGA Hamburg, 2021; CSIS, 2025). Kehadiran mereka secara signifikan mempersulit upaya resolusi konflik yang damai dan berkelanjutan, karena mereka seringkali menolak negosiasi dan bertujuan untuk menggagalkan setiap bentuk penyelesaian politik yang tidak sejalan dengan ideologi ekstrem mereka (GIGA Hamburg, 2021; CSIS, 2025). Ini menciptakan lingkaran setan kekerasan dan ketidakstabilan yang terus memberi ruang bagi ISIS untuk bertahan dan beroperasi (GIGA Hamburg, 2021). Dalam perspektif sekuritisasi, dinamika ini menunjukkan bagaimana negara-negara di kawasan bertindak sebagai securitizing actors yang membingkai ISIS sebagai ancaman eksistensial terhadap stabilitas nasional dan regional. Namun, sifat konflik yang berlarut dan kompleks seringkali menghambat tercapainya audience acceptance secara penuh, terutama ketika masyarakat mengalami kelelahan konflik (conflict fatigue) atau kehilangan kepercayaan terhadap kapasitas negara. Akibatnya, kebijakan keamanan yang diambil—termasuk operasi militer berkepanjangan dan pembatasan sipil—tidak selalu memperkuat legitimasi negara, tetapi dalam beberapa kasus justru memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap otoritas politik.

A. Kehadiran Digital sebagai Medan Perang Baru: Propaganda, Rekrutmen, dan Inspirasi

Dengan hilangnya kekhalfahan fisik sebagai pusat gravitasi operasional dan simbolis, ruang digital telah menjadi semakin krusial bagi ISIS untuk mempertahankan eksistensinya, menyebarkan ideologinya, merekrut anggota baru, menggalang dana, menginspirasi serangan teror, dan memelihara komunitas ekstremis virtual yang bersifat global (Swarthmore IR Journal, 2025; Reuters Institute, 2025). Analisis dari FPRI menekankan bagaimana ISIS secara efektif

memanfaatkan media sosial, forum internet, dan aparatus propaganda yang canggih untuk menyebarkan pesannya (Clarke, 2024). Studi mengenai dampak kampanye propaganda ISIS di media sosial menunjukkan bahwa pesan-pesan yang menonjolkan manfaat material, spiritual, dan sosial dari bergabung dengan ISIS berhasil meningkatkan dukungan online terhadap kelompok tersebut, meskipun konten yang menampilkan kekerasan brutal cenderung menurunkan dukungan kecuali di kalangan pendukung paling ekstrem (The University of Chicago Press, 2025).

Transformasi ke ruang digital ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga politis. Dalam kerangka sekuritisasi, propaganda ISIS dapat dipahami sebagai bentuk counter-speech act yang menantang narasi keamanan negara. Jika negara berupaya mengonstruksi ISIS sebagai ancaman yang harus diberantas, maka ISIS melalui propaganda digitalnya justru membalik narasi tersebut dengan memosisikan diri sebagai representasi “keadilan” bagi kelompok yang termarginalkan. Pertarungan ini menunjukkan bahwa sekuritisasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi arena kontestasi naratif antara negara dan aktor non-negara (Buzan et al., 1997; Conway, 2020; Bail et al., 2018; Journals of The University of Chicago Press, 2025).

Narasi propaganda ISIS juga mengalami adaptasi signifikan pasca-runtuhnya kekhalfahan. Fokus bergeser untuk menonjolkan narasi ketidakadilan global, keluhan-keluhan lokal di berbagai wilayah, dan posisi ISIS sebagai pembela kaum Muslim yang tertindas (victimhood narrative) untuk menarik simpati dan membenarkan penggunaan kekerasan (Swarthmore IR Journal, 2025). Glorifikasi serangan-serangan lone wolf dan operasi-operasi afiliasi regional di berbagai belahan dunia menjadi bukti klaim keberlangsungan jihad global ISIS, meski tidak lagi memiliki basis teritorial terpusat (Clarke, 2024). Pesan-pesan propaganda secara khusus menargetkan generasi muda yang merasa terisolasi, frustrasi, mencari identitas, tujuan hidup, dan rasa memiliki atau persaudaraan (Swarthmore IR Journal, 2025).

Dalam konteks ini, keberhasilan propaganda ISIS dalam menjangkau individu yang mengalami krisis identitas menunjukkan keterbatasan negara dalam mengontrol ruang sosial dan ideologis. Negara tidak hanya

kehilangan monopoli atas kekerasan, tetapi juga mulai kehilangan monopoli atas produksi makna dan identitas politik. Hal ini menandai pergeseran penting dalam relasi kekuasaan, di mana aktor non-negara seperti ISIS mampu memengaruhi persepsi dan preferensi individu tanpa harus menguasai wilayah secara fisik (Conway, 2020; Bail et al., 2018; Gill et al., 2017; Moncrieff, 2024).

Lebih lanjut, ISIS secara strategis mengeksploitasi isu gender dan perempuan dalam propagandanya, dengan narasi yang berbeda untuk target audiens berbeda. Untuk calon rekrutan perempuan, terutama dari Barat, ISIS mempromosikan citra “pengantin jhadi” yang berperan dalam membangun negara Islam atau bahkan sebagai pejuang perempuan, menawarkan rasa pemberdayaan dan tujuan hidup (Reuters Institute, 2025). Sebaliknya, untuk menarik rekrutan laki-laki, propaganda ISIS seringkali menampilkan perempuan sebagai objek eksploitasi seksual, mempromosikan konsep “jihad seksual” atau melegitimasi perbudakan perempuan dari kelompok minoritas agama (Reuters Institute, 2025). Laporan GIGA Focus mencatat bahwa meski kehilangan wilayah, propaganda ISIS masih konsisten menggunakan terminologi “kekhalfahan” dan menekankan kewajiban jihad (GIGA Hamburg, 2021). Selain itu, dengan semakin pentingnya peran afiliasi, terutama di Afrika, propaganda ISIS juga semakin banyak menyoroti keberhasilan dan aktivitas afiliasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan dan jangkauan global kelompok ini (Clarke, 2024).

Adaptasi strategi propaganda ISIS ini menghadirkan tantangan besar bagi upaya kontra-propaganda yang dilakukan negara dan organisasi internasional. Narasi ISIS yang canggih, beragam, dan tersebar luas melalui berbagai platform digital terbukti sulit dilawan secara efektif (Swarthmore IR Journal, 2025). Banyak pihak mengkritik bahwa upaya kontra-propaganda pemerintah seringkali kurang menarik, bersifat sarkastik, atau tidak mampu menyentuh aspek psikologis dan emosional yang membuat individu rentan terhadap radikalisisasi (The University of Chicago Press, 2025). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan strategi kontra-narasi yang lebih kredibel, adaptif, dan mampu menjangkau target audiens secara efektif, misalnya dengan melibatkan suara-suara mantan ekstremis atau korban terorisme (Reuters Institute, 2025).

Dari perspektif politik keamanan, kegagalan relatif negara dalam menghadapi propaganda digital ISIS juga berdampak pada legitimasi kebijakan keamanan. Upaya kontra-propaganda yang tidak efektif atau tidak kredibel dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyedia keamanan. Dalam kerangka sekuritisasi, hal ini menghambat proses audience acceptance, yang merupakan prasyarat utama bagi legitimasi extraordinary measures. Akibatnya, negara menghadapi dilema antara memperkuat kontrol digital dengan risiko melanggar kebebasan sipil, atau mempertahankan keterbukaan dengan konsekuensi meningkatnya paparan terhadap ideologi ekstremis (Buzan et al., 1997; Conway, 2020; Journals of The University of Chicago Press, 2025; Bail et al., 2018).

Transformasi ISIS ke ranah digital ini pada dasarnya memicu “perlombaan senjata digital” antara kemampuan propaganda dan rekrutmen online kelompok teroris dengan upaya kontra-propaganda, sensor, dan pengawasan online negara. ISIS dan kelompok sejenis terus berinovasi menemukan cara baru menyebarkan pesan, memanfaatkan platform baru, teknologi enkripsi, dan jaringan terdistribusi untuk menghindari deteksi dan penghapusan (Swarthmore IR Journal, 2025). Sebagai respons, negara-negara meningkatkan upaya penyaringan konten, penghapusan akun, dan pengawasan aktivitas online. Namun, ini adalah permainan “kucing-dan-tikus” yang terus dinamis. Efektivitas jangka panjang upaya negara memenangkan “perlombaan” ini masih dipertanyakan, mengingat sifat internet terdesentralisasi dan kemampuan kelompok teroris beradaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan kebijakan platform (Clarke, 2024). Selain itu, tindakan sensor yang berlebihan atau pengawasan yang terlalu intrusif berpotensi melanggar kebebasan berbicara dan privasi, yang dapat mendorong individu rentan ke platform lebih gelap, anonim, dan kurang termoderasi, di mana mereka justru terpapar konten ekstremis lebih intens (The University of Chicago Press, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi ISIS ke ranah digital tidak hanya mengubah medan operasional terorisme, tetapi juga menggeser arena politik keamanan ke ruang siber yang bersifat transnasional dan sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak lagi ditentukan semata oleh kontrol teritorial, tetapi oleh

kemampuan aktor—baik negara maupun non-negara—dalam mengonstruksi, menyebarkan, dan memonopoli narasi keamanan di ruang publik global (Conway, 2020; Moncrieff, 2024; Bail et

al., 2018; International Centre for Counter-Terrorism, n.d.).

Untuk memvisualisasikan variasi ini, tabel berikut menyajikan analisis komparatif:

Tabel 2: Sekuritisasi Ancaman ISIS di Negara-Negara Kunci Timur Tengah Pasca-2019

Negara	Aktor Sekuritisasi Utama	Wacana Dominan tentang Ancaman ISIS Pasca-Kekhalifahan	Langkah-Langkah Kebijakan Luar Biasa yang Diambil	Implikasi dan Potensi Kritik
Irak	Pemerintah Pusat, Militer, Parlemen	ISIS sebagai ancaman laten, sel tidur, potensi kebangkitan, perlunya kewaspadaan & dukungan internasional.	Operasi militer berkelanjutan, legislasi anti-teror, upaya kontra-ujaran kebencian.	Fokus pada keamanan mungkin mengabaikan rekonsiliasi & akar masalah sosial-ekonomi, ketergantungan pada aktor eksternal.
Mesir	Presiden, Militer, Aparat Keamanan	ISIS (khususnya IS-Sinai) sebagai bagian dari ancaman terorisme yang lebih luas terhadap stabilitas negara & keamanan nasional.	Operasi militer di Sinai, undang-undang darurat & anti-teror yang ketat, pembatasan kebebasan sipil, pembangunan ekonomi di Sinai.	Potensi penyalahgunaan hukum anti-teror untuk menekan oposisi, pelanggaran HAM, efektivitas jangka panjang dipertanyakan jika akar masalah tidak diatasi.
Arab Saudi	Kerajaan (Raja & Putra Mahkota), Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Keagamaan	ISIS sebagai ancaman ideologis (menyimpang dari Islam) & operasional (serangan simpatisan), pentingnya kontra-radikalisasi & kerjasama internasional.	Penegakan hukum agresif terhadap sel ISIS, program deradikalisasi ekstensif, kontrol narasi keagamaan, kerjasama CT internasional.	Kritik terhadap catatan HAM, potensi ekspor ideologi Wahabi konservatif (meskipun ada upaya reformasi), efektivitas program deradikalisasi sulit diukur secara independen.
Turki	Presiden, Pemerintah, Militer	Ancaman ISIS seringkali dibingkai dalam konteks	Operasi militer di Suriah (dengan klaim melawan ISIS &	Prioritas pada PKK dapat melemahkan

		ancaman PKK/YPG; terkadang ISIS dilihat sebagai ancaman sekunder atau bahkan dimanipulasi untuk tujuan politik lain.	YPG), penangkapan simpatisan ISIS, kebijakan perbatasan.	upaya kolektif melawan ISIS, kebijakan di Suriah dikritik memperburuk ketidakstabilan, potensi pelanggaran HAM dalam operasi CT.
--	--	--	--	--

Setelah suatu isu berhasil disekuritisasi dan langkah-langkah luar biasa telah diterapkan, muncul tantangan signifikan untuk “mendekonstruksi” ancaman tersebut atau kembali ke kondisi politik normal. Birokrasi keamanan yang telah diperluas, undang-undang khusus yang telah disahkan, dan pola pikir “darurat” yang telah tertanam dalam masyarakat dan institusi negara cenderung bertahan, bahkan jika ancaman langsung yang memicu sekuritisasi awal telah berkurang secara signifikan (Securitization of discourse at the Copenhagen School and Iraqi..., 2025). Aparatus keamanan yang tumbuh selama periode krisis akan berupaya untuk mempertahankan relevansi, anggaran, dan kekuasaannya (Securitization across borders..., 2025). Publik, yang mungkin telah terkondisikan untuk menerima tingkat pembatasan tertentu atas nama keamanan, bisa jadi enggan untuk melepaskan “rasa aman” yang ditawarkan oleh langkah-langkah tersebut (Securitization of discourse at the Copenhagen School and Iraqi..., 2025). Akibatnya, mengembalikan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, serta mencabut status “luar biasa” dari suatu isu, menjadi sebuah tantangan politik yang rumit dan seringkali membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dapat memiliki implikasi jangka panjang yang serius bagi hak-hak sipil, proses demokrasi, dan akuntabilitas pemerintah di negara-negara yang terdampak (Securitization across borders..., 2025).

B. Implikasi terhadap Kebijakan Kontra-Terrorisme Regional dan Tantangan Multidimensi

Transformasi ISIS menjadi aktor pasca-teritorial dengan strategi operasional yang adaptif dan jangkauan ideologis global melalui ruang digital menuntut pergeseran paradigma dalam kebijakan kontra-terorisme. Pendekatan yang

semata-mata berfokus pada tindakan militeristik atau penghancuran fisik terbukti tidak lagi memadai (How ISIS is adapting its tactics to survive: NPR, 2025). Sebaliknya, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan multidimensi, yang mencakup aspek sosial, psikologis, teknologi, dan ideologis untuk mengatasi ancaman ISIS secara efektif (International Crisis Group, 2025). Laporan dari Tony Blair Institute, misalnya, menekankan pentingnya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, memperkuat ketahanan komunitas, dan secara aktif mengganti narasi ekstremisme dengan narasi tandingan yang positif dan inklusif (Counter-Terrorism Policies in Egypt: Effectiveness and Challenges..., 2025).

Salah satu tantangan paling pelik yang dihadapi oleh komunitas internasional pasca-runtuhnya kekhalifahan ISIS adalah nasib puluhan ribu pejuang asing (foreign terrorist fighters – FTFs) dan keluarga mereka, termasuk perempuan dan anak-anak, yang kini ditahan di kamp-kamp seperti Al-Hol dan Roj di Suriah Timur Laut, atau di fasilitas penahanan lainnya di Irak dan Suriah (Human Rights Watch, 2025; The Al Hol, Roj Camps and Syrian Detention Complex..., 2025). Negara-negara asal para FTF ini menghadapi dilema kompleks terkait repatriasi, penuntutan, dan upaya deradikalisasi serta reintegrasi mereka kembali ke masyarakat (IOM – Rehabilitation and Reintegration Final Paper, 2024). Banyak negara enggan untuk merepatriasi warganya karena kekhawatiran akan risiko keamanan, kesulitan dalam mengumpulkan bukti untuk penuntutan yang berhasil, dan potensi reaksi negatif dari publik domestik. Namun, membiarkan mereka tetap berada dalam kondisi yang mengerikan dan tidak menentu di kamp-kamp penahanan juga berisiko menciptakan masalah keamanan jangka panjang, karena kamp-kamp tersebut dapat

menjadi lahan subur bagi radikalisme lebih lanjut dan perekrutan generasi baru ekstremis (IPinst, 2025). Berbagai model program deradikalisasi dan rehabilitasi telah diimplementasikan di berbagai negara, termasuk di Arab Saudi, Mesir, Yordania, Irak, dan wilayah Suriah Timur Laut yang dikelola secara otonom, namun efektivitas dan tantangannya sangat bervariasi tergantung pada konteks lokal, sumber daya yang tersedia, dan komitmen politik (Counter-Terrorism Policies in Egypt: Effectiveness and Challenges..., 2025; IOM – Rehabilitation and Reintegration Final Paper, 2024).

Kompleksitas deradikalisasi semakin meningkat dalam konteks negara-negara yang masih dilanda konflik atau berada dalam fase pasca-konflik yang rapuh, seperti Irak dan Suriah. Kurangnya keamanan yang stabil, infrastruktur fisik dan sosial yang hancur akibat perang, trauma psikologis yang meluas di kalangan populasi, stigma sosial yang mendalam terhadap individu yang terkait dengan ISIS, dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara yang lemah atau korup, semuanya dapat secara signifikan menghambat efektivitas program deradikalisasi dan reintegrasi (Human Rights Watch, 2025; IOM – Rehabilitation and Reintegration Final Paper, 2024). Dalam lingkungan seperti ini, kebutuhan dasar seperti keamanan pribadi dan mata pencaharian seringkali lebih mendesak daripada partisipasi dalam program perubahan ideologis. Trauma perang yang tidak tertangani dapat memperburuk masalah kesehatan mental yang membuat individu lebih rentan terhadap narasi ekstremis yang menawarkan “solusi” sederhana atau rasa memiliki (IPinst, 2025). Lebih lanjut, stigma yang kuat dari komunitas yang telah menderita secara langsung di tangan ISIS dapat membuat proses reintegrasi mantan anggota atau keluarga mereka menjadi hampir mustahil, yang berpotensi mendorong individu yang kembali ke marginalisasi lebih lanjut atau bahkan kembali ke jalur ekstremisme sebagai satu-satunya pilihan yang tersisa (Human Rights Watch, 2025).

Mengingat sifat transnasional dari ancaman ISIS, kerja sama internasional dan regional dalam bidang intelijen, penegakan hukum, dan berbagai praktik terbaik menjadi sangat penting (U.S. Department of State, 2019). Upaya bersama diperlukan untuk melacak pergerakan teroris, memutus jaringan pendanaan mereka, melawan propaganda online lintas batas, dan

mengkoordinasikan strategi kontra-terorisme (U.S. Department of State, 2019). Laporan U.S. State Department secara konsisten menekankan pentingnya kerja sama Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya dalam berbagai aspek kontra-terorisme (Saudi Arabia – United States Department of State, 2021–2025).

Namun, upaya kontra-terorisme yang hanya berfokus pada aspek keamanan dan penindakan tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang jika tidak disertai dengan upaya serius untuk mengatasi akar masalah (root causes) yang berkontribusi pada radikalisme dan perekrutan oleh ISIS. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, marginalisasi politik, tata kelola yang buruk, korupsi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, serta ketidakadilan yang dirasakan, semuanya dapat menciptakan lingkungan yang membuat individu rentan terhadap narasi ekstremis yang ditawarkan oleh ISIS (CSIS, 2025). Oleh karena itu, strategi kontra-terorisme yang holistik harus mencakup program-program pembangunan ekonomi, peningkatan tata kelola yang baik dan akuntabel, promosi pendidikan inklusif, penguatan supremasi hukum, dan upaya rekonsiliasi nasional untuk mengatasi perpecahan sektarian dan etnis (CSIS, 2025).

SIMPULAN

Transformasi politik ISIS pasca-keruntuhan kekhalifahan fisiknya pada tahun 2019 telah menghadirkan babak baru yang kompleks dalam studi politik keamanan di Timur Tengah. Kelompok ini telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, bergeser dari entitas proto-negara yang menguasai teritori menjadi jaringan transnasional yang terdesentralisasi dan lebih sulit dipahami. Strategi operasionalnya kini lebih mengandalkan afiliasi regional yang tersebar, perang gerilya, serangan yang diinspirasi secara individual (lone wolf), dan eksploitasi masif terhadap ruang digital untuk propaganda, rekrutmen, dan penggalangan dukungan. Meskipun kekhalifahan fisik telah hilang, ancaman ideologis dan operasional ISIS tetap signifikan, terus beradaptasi dengan dinamika politik dan keamanan regional yang bergejolak.

Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa konsep keamanan dalam studi

Ilmu Politik dan Hubungan Internasional tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan teritorial dan militer. Transformasi ISIS sebagai aktor pasca-teritorial menunjukkan bahwa ancaman keamanan kontemporer semakin bersifat konstruktif dan bergantung pada proses sekuritisasi yang melibatkan produksi narasi, legitimasi politik, serta penerimaan sosial. Dalam kerangka ini, teori sekuritisasi tidak hanya relevan untuk menjelaskan respons negara, tetapi juga untuk memahami bagaimana aktor non-negara seperti ISIS secara aktif membentuk persepsi ancaman dan memengaruhi praktik keamanan global. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan pendekatan konstruktivis dalam studi keamanan dengan menunjukkan bahwa dinamika ancaman ditentukan oleh interaksi antara aktor, wacana, dan konteks sosial-politik.

Tantangan yang berkelanjutan dari ISIS sebagai aktor pasca-teritorial tidak dapat diremehkan. Kemampuan ISIS untuk mengeksploitasi konflik lokal, kekosongan tata kelola, dan keluhan sosial-ekonomi di berbagai negara Timur Tengah, ditambah dengan jangkauan global propaganda digitalnya yang canggih, menghadirkan ancaman keamanan yang bersifat dinamis dan multidimensi. Kondisi di kamp-kamp tahanan dan pengungsi, seperti Al-Hol dan Roj, yang menampung puluhan ribu individu terkait ISIS, tetap menjadi “bom waktu” yang berpotensi menjadi sumber rekrutmen dan radikalisis di masa depan jika tidak ditangani dengan solusi yang komprehensif dan manusiawi. Kebangkitan kembali aktivitas ISIS di Suriah pasca-jatuhnya rezim Assad pada akhir 2024 semakin menggarisbawahi kemampuan kelompok ini untuk memanfaatkan momentum ketidakstabilan.

Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam berbagai aspek transformasi ISIS ini. Efektivitas jangka panjang dari berbagai model program deradikalisasi dan reintegrasi dalam konteks budaya dan politik yang beragam di Timur Tengah memerlukan evaluasi yang lebih sistematis. Dampak spesifik dari strategi propaganda baru ISIS terhadap audiens regional yang berbeda, serta interaksi antara narasi global ISIS dengan keluhan-keluhan lokal, juga menjadi area penting untuk kajian di masa depan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama,

keterbatasan akses terhadap data primer, khususnya komunikasi internal ISIS atau wawancara langsung dengan aktor terkait, menyebabkan analisis sangat bergantung pada sumber sekunder dan dokumen propaganda yang tersedia secara publik. Kedua, pendekatan studi kasus komparatif terbatas pada beberapa negara di Timur Tengah, sehingga temuan penelitian ini belum sepenuhnya dapat digeneralisasi ke konteks global yang lebih luas. Ketiga, dinamika ISIS yang sangat fluid dan cepat berubah membuat sebagian temuan bersifat kontekstual terhadap periode waktu tertentu, sehingga memerlukan pembaruan analisis secara berkala.

Dari sisi kebijakan, transformasi ISIS menuntut respons yang lebih dari sekadar pendekatan militeristik. Diperlukan strategi kontra-terorisme yang holistik dan multi-aspek, yang secara serius mengatasi akar penyebab ekstremisme, termasuk isu-isu tata kelola, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi. Upaya melawan propaganda online harus ditingkatkan dengan narasi tandingan yang kredibel dan strategi komunikasi yang inovatif. Kerja sama internasional dan regional dalam berbagi intelijen, penegakan hukum, dan pengembangan kapasitas menjadi semakin krusial. Lebih lanjut, komunitas internasional harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi para tahanan ISIS dan keluarga mereka, termasuk melalui proses repatriasi, penuntutan yang adil, dan program rehabilitasi yang efektif. Kewaspadaan yang berkelanjutan dan kemauan untuk terus mengadaptasi strategi kontra-terorisme akan menjadi kunci dalam menghadapi evolusi ancaman ISIS yang terus berlangsung di Timur Tengah dan sekitarnya.

Ke depan, penelitian lanjutan perlu mengembangkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses sekuritisasi berlangsung secara spesifik di masing-masing negara, termasuk variasi dalam speech act, karakteristik audience, serta bentuk extraordinary measures yang diambil. Selain itu, studi komparatif lintas kawasan, misalnya antara Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara, akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai adaptasi ISIS dalam konteks politik yang berbeda. Penelitian juga perlu mengeksplorasi lebih jauh peran teknologi digital dan algoritma media sosial dalam memperkuat atau menghambat proses sekuritisasi, serta dampaknya terhadap

hubungan antara negara dan masyarakat dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran atas dukungan dana penelitian yang telah diberikan, sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Yusa Djuyandi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan materi, arahan, dan bimbingan selama proses penelitian berlangsung. Bantuan dan masukan Bapak sangat berharga dalam memperkaya analisis dan memastikan kualitas penelitian ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan yang berlimpah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almohamad, S. (n.d.). Not a storm in a teacup: The Islamic State after the Caliphate. GIGA Hamburg. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/not-a-storm-in-a-teacup-the-islamic-state-after-the-caliphate>
- Arab Center DC. (2022). Insurgency in Sinai: Challenges and prospects. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://arabcenterdc.org/resource/insurgency-in-sinai-challenges-and-prospects/>
- Bail, C. A., Merhout, F., & Ding, P. (2018). From isolation to radicalization: Anti-Muslim hostility and support for political violence. *American Political Science Review*, 112(4), 1–17. <https://doi.org/10.1017/S0003055418000618>
- Barcena, N.-D., & Noh, A. (2016). Combating terrorism through prosecutions & rehabilitation: Three models compared. Stanford Law School. Diakses 3 Juni 2025, dari https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/07/Barcena-Daines-Noh_Combating-Terrorism-Through-Prosecutions-Rehabilitation-Three-Models-Compared.pdf
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1997). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781685853808>
- Center for Strategic and International Studies. (n.d.-a). The return of ISIS in Iraq, Syria, and the Middle East. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.csis.org/analysis/return-isis-iraq-syria-and-middle-east>
- Center for Strategic and International Studies. (n.d.-b). The real world capabilities of ISIS: The threat continues. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.csis.org/analysis/real-world-capabilities-isis-threat-continues>
- Charles University. (2023). Camilla Biolcati: Master's thesis. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/186808/120457699.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Conway, M. (Ed.). (2020). *Islamic State's online activity and responses* (C. Conway & S. Macdonald, Penyunting). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003015406>
- Counter-Terrorism Policies in Egypt: Effectiveness and challenges. (n.d.). IEMed. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.iemed.org/publication/counter-terrorism-policies-in-egypt-effectiveness-and-challenges/>
- Dermawan, E., Holt, A., & Mendes, Y. (2024). The Islamic State five years after the collapse of the caliphate. Foreign Policy Research Institute. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.fpri.org/article/2024/03/the-islamic-state-five-years-after-the-collapse-of-the-caliphate/>
- Effi, B. (2018). What explains the flow of foreign fighters to ISIS? Diakses 3 Juni 2025, dari <https://effibenmelech.com/wp-content/uploads/2018/10/foreign-fightersto-isis.pdf>
- Gill, P., Corner, E., Conway, M., Thornton, A., Bloom, M., & Horgan, J. (2017). Terrorist use of the internet by the numbers. *Criminology & Public Policy*, 16(1), 99–117. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12249>
- Human Rights Watch. (2025, 7 Februari). Northeast Syria: Camp detainees face uncertain future. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.hrw.org/news/2025/02/07/northeast-syria-camp-detainees-face-uncertain-future>
- Institute for Economics & Peace. (2025). Lone-wolf and youth terrorism. *Vision of Humanity*. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.visionofhumanity.org/wp->

- content/uploads/2025/03/Lone-Wolf-and-Youth-Terrorism.pdf
- International Centre for Counter-Terrorism. (n.d.-a). Global Extremism Monitor: Islamist violence after ISIS. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://icct.nl/sites/default/files/import/publication/Global-Extremism-Monitor-Islamist-Violence-after-ISIS.pdf>
- International Centre for Counter-Terrorism. (n.d.-b). RIC Hidden Battlefields (Desember 2020). Diakses 3 Juni 2025, dari https://icct.nl/sites/default/files/import/publication/RIC_HiddenBattlefields_DEC2020.pdf
- International Organization for Migration. (2024). Rehabilitation and reintegration final paper (HA, November 2023). Diakses 3 Juni 2025, dari <https://iraq.iom.int/sites/g/files/tmzbd11316/files/documents/2024-02/rehab-and-reintegration-final-paper-edits-ha-november-23-2023-v1.pdf>
- International Crisis Group. (2025). Ten challenges for the UN in 2024–2025. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.crisisgroup.org/global/sb12-ten-challenges-un-2024-2025>
- Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan Province. (n.d.). EBSCO research starter: Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan Province. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.ebsco.com/research-starters/diplomacy-and-international-relations/islamic-state-iraq-and-levant-khorasan>
- IOM. (2024). Rehabilitation and reintegration final paper edits. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://iraq.iom.int/sites/g/files/tmzbd11316/files/documents/2024-02/rehab-and-reintegration-final-paper-edits-ha-november-23-2023-v1.pdf>
- IPinst. (n.d.). A new approach to countering terror financing and online extremism. Diakses 3 Juni 2025, dari https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/a_new_approach_epub.pdf
- Journals of The University of Chicago Press. (2025). Studying the impact of ISIS propaganda campaigns. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/716281>
- Lister, C. (2016). INO volume 70 issue 3 cover and back matter. International Organization, 70(3), b1–b2. <https://doi.org/10.1017/S0020818316000151>
- Maura, C. (2020). Islamic State’s online activity and responses (M. Conway & S. Macdonald, Eds.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003015406>
- Moncrieff, M. (2024). Terrorism as coalitional predation: Explaining definitional ambiguities and precautionary responses. *Evolutionary Psychology*, 22(2). <https://doi.org/10.1177/14747049241263995>
- NPR. (2025, 7 Januari). How ISIS is adapting its tactics to survive. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.npr.org/2025/01/07/nx-s1-5249990/isis-resurging>
- Norwich University. (n.d.). The Al Hol, Roj camps and Syrian detention complex: Cruel and dangerous foreign policy. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.norwich.edu/topic/all-blog-posts/al-hol-roj-camps-and-syrian-detention-complex-cruel-and-dangerous-foreign-policy>
- O’Halloran, E. C. (2014). Mary Kaldor, *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era* (3rd ed.). Cambridge: Polity Press (2012), 268 pp. *Nations and Nationalism*, 20(4), 833–834. https://doi.org/10.1111/nana.12092_9
- Oxford University Press. (2016). Civilization and its consequences (B. Bowden, Ed.). In *Oxford Handbook Topics in Politics*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935307.013.30>
- Program on Extremism. (n.d.). The Long Jihad: The Islamic State’s method of insurgency. George Washington University. Diakses 3 Juni 2025, dari https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs5746/files/The_Long_Jihad.pdf
- PRIF. (2025, April). Without a caliphate, but far from defeated: Why Da’esh/ISIS remains a threat in Syria in 2025. Peace Research Institute Frankfurt. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://blog.prif.org/2025/04/07/without-a-caliphate-but-far-from-defeated-why-daesh-isis-remains-a-threat-in-syria-in-2025/>
- Reuters Institute. (n.d.). ISIS and propaganda: How ISIS exploits women. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Isis%2520and%25>

- 20Propaganda-
%2520How%2520Isis%2520Exploits%2520
Women.pdf
- ResearchGate. (2025). Studying the impact of ISIS propaganda campaigns. Diakses 3 Juni 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/353280432_Studying_the_Impact_of_ISIS_Propaganda_Campaigns
- ResearchGate. (n.d.). Turkey's border security policy against non-state actors, 2016–2019. Diakses 3 Juni 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/341784135_TURKEY'S_BORDER_SECURITY_POLICY_AGAINST_NON-STATE_ACTORS_2016-2019
- SocioStudies. (n.d.). Regional securitization of ISIS in Southeast Asian counter-terrorism strategies for the post-ISIS era. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.sociostudies.org/journal/articles/3482795/>
- Stanford University Press. (n.d.). Combating terrorism through prosecutions & rehabilitation: Three models compared (N.-D. Barcena & A. Noh, Pen). Diakses 3 Juni 2025, dari https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/07/Barcena-Daines-Noh_Combating-Terrorism-Through-Prosecutions-Rehabilitation-Three-Models-Compared.pdf
- Turkish Offensive into North-Eastern Syria. (n.d.). Wikipedia. Diakses 3 Juni 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Turkish_offensive_into_north-eastern_Syria
- U.S. Department of State. (2019). Country reports on terrorism 2019. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/>
- U.S. Department of State. (2020). Country reports on terrorism 2020: Yemen. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/yemen/>
- U.S. Department of State. (2023). Country reports on terrorism 2023: Egypt. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2023/egypt/>
- Vision of Humanity. (2025, Maret). Global terrorism index 2025. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/03/Global-Terrorism-Index-2025.pdf>
- Vision of Humanity. (2025). Terrorism spreads as lone wolf attacks dominate the West. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://www.visionofhumanity.org/terrorism-spreads-as-lone-wolf-attacks-dominate-the-west/>
- Wikipedia. (2025). Sinai insurgency. Diakses 3 Juni 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Sinai_insurgency
- Yeo, K. (2023). Geography, governance, guns: Characterising Islamist terrorist sanctuaries in Maritime Southeast Asia (2014–2021). *Asian Security*, 19(1), 82–101. <https://doi.org/10.1080/14799855.2022.2132854>